

**DEMOKRASI RASIONAL JÜRGEN HABERMAS:
STUDI AGAMA DALAM RUANG PUBLIK**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

MOH. NOR FAUZAN
NIM. 14510051

**JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018



Dosen : Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdra. Moh. Norfauzan
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Norfauzan
NIM : 14510051
Jurusan/Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : Demokrasi Rasional Jürgen Habermas: Studi Agama dalam Ruang Publik

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2018
Pembimbing,

Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag.
NIP: 19561215 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moh. Norfauzan
NIM : 14510051
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Alamat Rumah : Jl. Arjuno, RT. 017 RW. 003, Lombang Giliraja,
Giligenting, Sumenep.
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimokurdo, No. 47, Sapen, Depok, Sleman,
Yogyakarta.
Telp/HP : 087705715132
Judul : Demokrasi Rasional Jürgen Habermas: Studi Agama
dalam Ruang Publik.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Mei 2018
Menyatakan


Moh. Norfauzan
NIM. 14530057



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B.1208/Un.02/Du/Pp.05.03/07/2018

Tugas Akhir dengan judul : DEMOKRASI RASIONAL JÜRGEN HABERMAS: STUDI
AGAMA DALAM RUANG PUBLIK

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. NOR FAUZAN
Nomor Induk Mahasiswa : 14510051
Telah diujikan pada : Senin, 02 Juli 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : 90 A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag.
NIP. 19561215 198803 1 001

Penguji II

Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.
NIP.19750816 200003 1 001

Penguji III

Dr. Alim Roswanto, M.Ag.
NIP. 19681208 199802 1 002

Yogyakarta, 02 Juli 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M.Ag.
NIP. 19681208 199802 1 002

MOTTO

ومن لم يذق ذل التعلم ساعة
تجرع ذل الجهل طول حياته

Barangsiapa yang tidak mau merasakan lelahnya belajar sesaat,
maka ia akan terus-menerus merasakan hinanya kebodahan sepanjang hidupnya

(Imam Syafi'i)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tulisan ini Kepada

Ayahanda dan Ibunda

karena sesungguhnya karya ini tak akan terwujud
tanpa adanya sumbangsi material, moril, dan do'a keduanya,
serta harapan dan kasih sayangnya.

Kekasih Hatiku dan Pendamping Hidupku Esok Hari

siapapun dia, dimanapun dia, terimalah persembahan ini.

Almamaterku Tercinta

Aqidah dan filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah kepada hamba-Nya. Hanya dengan pertolongan-Nya penyusunan Skripsi dengan judul “*Demokrasi Rasional Jürgen Habermas: Studi Agama dalam Ruang Publik*” dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sang revolusioner dunia, filsuf dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiah yang terang benderang penuh dengan cahaya kebenaran.

Atas terselesainya penyusunan skripsi ini penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Alim Roswantoro, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain, selaku Penasehat Akademik.

4. Bapak Drs. H. Abdul Basir Solissa, M.Ag, selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan saran, masukan, serta bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Aqidah dan Filsafat Islam “ Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag., Fatimah Husein, M.A., Ph.D., Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I., Dr. Muhammad Fatkhan, S.Ag., M.Hum., Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.Ag., Dr. Mutiullah, S.Fil.I., M.Hum., Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum., Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag., M.Ag., Dr. Sudin, M.Hum. (Alm), Dr. H. Zuhri, S.Ag., M.Ag. Dr. Syaifan Nur, M.A., Drs. H. Muzairi, M.A., yang telah mentranformasikan ilmu dengan penuh kesabaran.
6. Seluruh Staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah membantu selama menyusun berada di bangku kuliah.
7. Rasa terima kasih serta salam ta'dzim kepada Tolak Ito (Ayahanda) dan Sukrawani (Ibunda) yang telah banyak berkorban dan tidak pernah berhenti memberikan do'a, dorongan dan semangat untuk penyusun dalam menuntut ilmu. Tidak lupa pula kepada Sahye, Alm Satria (selaku Nenek penyusun) Hayati (Adek ayahanda dan sekaligus Ibunda kedua) yang telah merawat dan membesarkan penyusun. Tak lupa pula Efa Diana Susanti dan Fina Aprilianty (selaku adek sepupu penyusun) yang telah menyempatkan waktunya menemani, menghibur, dan tak kala penting selalu mau meluangkan waktunya untuk kebutuhan penyusun.
8. Sahabat-sahabat AFI khususnya Moh. Afnan Rahmaturrahman, M. Noer Dicky Fajrin, Imam Bustomi, Ahmad Hasanuddin, yang telah sudi meluangkan

waktunya menemani penyusun selama di Jogja dengan agenda ngopi, bercanda ria, nge-basa-basi, serta saling tukar pikiran, dan angkatan AFI 2014 pada umumnya.

9. kawan-kawan HMI-MPO khususnya di Lingkup UIN Sunan Kalijaga dan Cabang Yogyakarta pada umumnya. Yang telah mengajarkan penyusun untuk mencintai buku, berdialektika, dan mengajarkan berbagai hal kepada penyusun untuk menjadi Kader Ummat dan Insan Ulil Albab.
10. Serta semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah turut membantu penyusun dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Semoga amal dan kebaikan mereka mendapat balasan yang sepadan dari Allah AWT. Bagi Penyusun semoga skripsi ini bermamfaat dan bukan karya yang terakhir. Amien.

Yogyakarta, 29 Mei 2018

Penyusun

Moh. Norfauzan
14510051

ABSTRAK

Dewasa ini asumsi tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat, hanya diperoleh dengan partisipasi rakyat dalam ruang publik demokrasi. Perdebatan tentang posisi rakyat dalam ruang publik menghasilkan dua model demokrasi. *Pertama*, demokrasi liberal yang menekankan kebebasan individu dengan memarjinalkan agama. Sehingga agama diprivatisasi dan tidak boleh berpartisipasi dalam ruang publik. *Kedua*, demokrasi komunitarian atau republikan yang menekankan agama harus berpartisipasi dalam ruang publik. Bahkan agama menjadi kekuatan politik. Persoalan ini menjadi perdebatan panjang berbagai kalangan yang hingga kini belum memenuhi titik temu dan jauh dari selesai, malah semakin memperkaya wawasan. Bahkan pembahasan tentang persoalan ini tidak akan pernah habis-habisnya, sepanjang peradaban manusia.

Jenis Penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-literatur. Sementara itu penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis. Penelitian ini bersifat deskriptif, interpretatif, dan analisis, yaitu menggambarkan pemikiran Jürgen Habermas mengenai peran dan posisi agama dalam ruang publik demokrasi. Setelah itu, dilakukan penafsiran secara objektif, dan analisis terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya pasca-reformasi, serta sejauh mana relevansinya.

Berdasarkan pada hasil penelitian. Pemikiran Jürgen Habermas tentang demokrasi merupakan jalan tengah (*moderat*) antara demokrasi liberal dan demokrasi komunitarian. Diskursus menjadi prosedur tindakan komunikatif untuk mencapai konsensus yang legitim. Habermas tidak memprivatisasi agama dalam ruang publik, sebagaimana demokrasi liberal, dan tidak menjadikan agama sebagai kekuatan politik dalam ruang publik, sebagaimana komunitarian. Pendirian Habermas tidak tanpa alasan. Menurutnya masyarakat kontemporer ada pada fase post-metafisik, masyarakat kontemporer sangat plural, dan netralitas negara bukan memihak pada salah satu pandangan hidup. Tetapi mengcover semua pandangan hidup. Sehingga dengan begitu, Habermas memperbolehkan agama memasuki arena diskursus ruang publik, dengan menggunakan argumentasi rasional atau nilai-nilai universal dari agama. Argumentasi agama ini hanya boleh masuk pada politik informal, dan tidak boleh masuk pada politik formal. Di dalam politik formal, yang digunakan adalah penalaran publik (*argumentasi sekuler*).

Fenomena keagamaan di Indonesia pasca-reformasi dari konflik intra dan antar agama, terorisme, isu SARA, hingga penerapan Perda-Perda Syariah. Melihat fenomena tersebut, demokrasi deliberatif Jürgen Habermas Sangat relevan. Masyarakat plural di Indonesia harus melakukan diskursus bersama untuk saling memahami, sehingga akan tercipta konsensus yang legitim. Dalam pengambilan konsensus melibatkan semua elemen masyarakat di Indonesia, mengingat pluralitas masyarakat. Seharusnya nilai-nilai universal agama yang di bawah dalam ruang publik, bukan doktrin komprehensif, dan konsep demokrasi deliberatif Habermas sejalan dengan cita-cita para *Founding Father* yang memperhitungkan agama

(nilai-nilai universalitas agama) dan tidak menjadikan agama sebagai kekuatan politik formal.

Kata Kunci: Demokrasi, Agama, ruang publik, *Diskursus*.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Tinjaun Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan	16

BAB II JURGEN HABERMAS: BIOGRAFI, MAZHAB FRANKFURT, DAN KONSEP DASAR PEMIKIRANNYA	18
A. Biografi Jürgen Habermas	18
B. Mazhab Frankfurt	20
1. Generasi Pertama Mazhab Frankfurt	27
a. Kritik Terhadap Marxisme Ortodok	27
b. Kritik Terhadap Positivisme	29
c. Kritik Terhadap Rasionalitas Modernisme	33
2. Generasi Kedua Mazhab Frankfurt	41
C. Epistemologi Jürgen Habermas.....	47
1. Teori Kritis	48
2. Tindakan Komunikatif.....	50
BAB III AGAMA DALAM DISKURSUS RUANG PUBLIK DEMOKRASI DELIBERATIF	53
A. Konteks Sosio-Politik Lahirnya Demokrasi Deliberatif	53
B. Teori Diskursus	61
1. Titik Tolak Etika Diskursus.....	61
2. Etika Diskursus.....	65
3. Diskursus Politis Deliberatif.....	67
C. Ruang Publik Politis.....	70
D. Agama dalam Ruang Publik.....	74

BAB IV RELEVANSI DEMOKRASI DELIBERATIF TERHADAP FENOMENA KEAGAMAAN DALAM PRAKTEK DEMOKRASI DI INDONESIA	83
A. Tangtangan Demokrasi Pasca-Reformasi	83
a. Penerapan Perda Syariah dan Konflik Intra dan Antar Agama	85
b. Terorisme.....	90
c. Isu SARA.....	95
B. Tuntutan Diskursus dalam Praktek Demokrasi di Indonesia.	99
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
CURRICULUM VITAE	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah runtuhnya Nazisme dan Stalinisme demokrasi nampaknya telah mencatat kemenangan historis atas bentuk-bentuk pemerintahan yang lain. Semua jenis rezim politik di seluruh dunia mengklaim sebagai rezim demokrasi¹. Kemenangan sistem demokrasi akibat sistem pemerintahan lain seperti aristokrat, monarki, oligarki, dan totalitariat, tidak dapat menjawab kebutuhan rakyat tentang keadilan dan kesejahteraan. Jelas bahwa demokrasi mempunyai potensi untuk memberikan yang terbaik kepada manusia, terutama dalam melindungi hak-hak individu dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan yang lebih perkasa seperti kekuasaan negara dan pemerintah.²

Sebagai sebuah kondisi ideal, demokrasi menjadi salah satu jalan rakyat untuk mencapai cita-citanya. Tetapi upaya menuju demokrasi yang ideal merupakan sebuah proses yang tidak mudah. Proses demokrasi inilah yang disebut sebagai demokratisasi.

Sebuah penelitian memperlihatkan, dalam satu abad terakhir, jumlah negara yang memadai untuk disebut demokratis melonjak 10 kali lipat menjadi 100 Negara. Penelitian ini berlangsung pada tahun 1996, dapat diperkirakan

¹David Held, *Demokrasi dan Tatanan Global: dari Negara Modern hingga pemerintahan kosmopolitan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3

² Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm.

bahwa dewasa ini tinggal segelintir negara saja yang masih bertahan dengan sistem totaliter.³ Terlepas dari itu, dialog tentang konsepsi demokrasi masih belum usai diperdebatkan. Konsep tersebut akan senantiasa bergulir dalam perdebatan sejalan dengan peradaban manusia.

Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin “*power of the people*”, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan.⁴ Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam istilah demokrasi, demokrasi berasal dari dua kata *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan. Maka demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁵ Dari istilah tersebut dapat dipahami bahwa esensi dari demokrasi adalah rakyat itu sendiri.

Demokrasi biasanya diawali dengan adanya liberalisasi (*meluasnya kebebasan*) baik kebebasan media massa, kebebasan rakyat menyampaikan aspirasinya. Sehingga tidak menghadapi ancaman pemberendelan dan masyarakat leluasa melakukan partisipasi sosial melalui organisasi dan wahana

³Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu politik: kajian mendasar ilmu politik* (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 260

⁴Sebagai halnya yang dikatakan Jhon Locke, kekuasaan tertinggi merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari rakyat; bahwa suprimasi pemerintah adalah suprimasi yang dilegalisasikan yang berpegangan pada kepercayaan ini dipertahankan; dan bahwa keabsahan atau hak pemerintah untuk memerintah dapat ditarik jika rakyat menilai hal ini perlu dan patut dilakukan, yakni jika hak-hak individu dan “tujuan-tujuan masyarakat” David Held, *Demokrasi dan Tatanan Global: dari Negara Modern hingga pemerintahan kosmopolitan*, hlm. 52

⁵Muliansyah A. Ways, *Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2015), hlm. 26

lain, serta dalam sistem demokrasi berkembang penghargaan terhadap keberagaman (Pluralisme).

Panggung aspirasi rakyat itu adalah ruang publik.⁶ Karena ruang publik merupakan ruang demokratis dalam menyatakan opini-opini, kepentingan, dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Maka ruang publik harus dibuka lebar oleh pemerintah. Dalam diskursus demokrasi dan politik kontemporer, konsep ruang publik menempati posisi yang sangat sentral. Mengingat tercapainya demokrasi secara ideal tergantung pada ruang publiknya. Sehingga ruang publik menjadi syarat utama dalam negara yang menyelenggarakan suatu pemerintahan yang demokratis. Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung makna bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan-ketentuan dalam penyelesaian problematika kehidupannya. Termasuk dalam menilai kebijakan negara. Sebab, kebijakan tersebut berkaitan dengan kehidupan rakyat sendiri.

Ruang publik yang sehat⁷ menghasilkan demokrasi ideal yang menjadi cita-cita rakyat. Rakyat sebagai warga negara juga menyandang status sebagai

⁶ Ruang publik (*civil society*) merupakan ruang universal dan berbeda dengan ruang privat yang bersifat partikular. Ruang publik adalah sebuah diskursif dimana kelompok-kelompok orang bisa berkumpul untuk mendiskusikan apa-apa yang mereka ingin diskusikan, dan bila mungkin, sampai pada keputusan-keputusan tertentu. Ruang Publik menjadi teater dimana partisipasi sipil dijalankan. Habermas sendiri tidak mengasal-usulkan distingsi ini ke masyarakat Yunani melainkan ke masyarakat borjuis abad ke-18 di Prancis dan Inggris. Lihat di F. Budi Hardima Ed, *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokrasi" dari Polis sampai Cyberspace* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 26

⁷ Yang dimaksud dengan kesehatan ruang publik harus memenuhi dua persyaratan, yakni bebas dan kritis. Bebas artinya setiap pihak dapat berbicara di mana pun, berkumpul, dan berpartisipasi dalam debat politik. Kritis artinya siapa pun boleh secara adil dan bertanggungjawab menyoroti proses-proses pengambilan keputusan yang bersifat publik. Lih Reza A. A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 126

warga religius. Perdebatan tentang posisi agama dalam ruang publik menghasilkan dua sistem demokrasi. *Pertama*, demokrasi liberal atau sekuler; agama harus ditempatkan pada ruang privat, tanpa ikut campur dalam ruang publik. *Kedua*, demokrasi komunitarian; agama harus berpartisipasi dalam ruang publik, dalam artian ikut serta dalam roda pemerintahan. Semua itu, merupakan persoalan-persoalan tentang ruang publik.

Di Indonesia pada masa Orde Baru era Suharto, agama (khususnya Islam) mengalami proses marjinalisasi ke dalam ranah privat. Hal tersebut terjadi bukan karena masyarakat Indonesia sendiri sudah bersifat sekuler melainkan karena represi dari penguasa. Setelah otokrasi Suharto tumbang, agama segera memenuhi lanskap kehidupan politik di Indonesia. Bahkan, tidak dapat dipungkiri ini adalah fakta “terlalu banyak agama” dalam kehidupan publik. Hal itu sering ditampilkan dalam wujud yang dekonstruktif dan disertai dengan aksi-aksi kekerasan. Keprihatinan tentang hal ini, misalnya, diungkapkan oleh *Wahid Institute* dalam penelitian tentang konflik antar agama dalam bukunya *Politisasi Agama dan Konflik Komunal : Beberapa isu penting di Indonesia*.

Terbenamnya Orde Baru dan terbitnya reformasi. Fenomena keagamaan terutama fundamentalisme agama dalam ruang publik menjadi perhatian mengingat pluaralitas agama di Indonesia. Dari konflik intra agama, antar agama, terorisme, Isu SARA, dan penerapan Perda-perda Syariah. Jika fenomena tersebut terus berkembang dalam negara, tidak menutup kemungkinan akan bermuara pada konflik dan bahkan kehancuran negara demokratis.

Melihat problematika tersebut, sistem demokrasi seperti apa yang cocok untuk Indonesia. Apakah liberalisme ? ataukah komunitarianisme?. Namun, diantara salah satu dari keduanya tidak ada yang cocok. *Pertama*, penerapan demokrasi liberal di Indonesia tidak baik, mengingat agama tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. *Kedua*, penerapan demokrasi komunitarian juga tidak baik, mengingat pluralitas masyarakat di Indonesia. Lalu, bagaimana rakyat memposisikan dirinya dalam demokrasi. Dalam hal ini, salah satu pemikir yang mengembangkan konsep demokrasi dan penekanannya dalam ruang publik adalah Jürgen Habermas yang cukup ekstensif.

Jürgen Habermas merupakan penerus Marxian (Neo-Marxis) yang sangat kritis dari generasi kedua Mazhab Frankfurt. Ia tampaknya seorang Filsuf layak untuk dikedepankan dalam pembahasan mengenai epistemologi kontemporer. Meskipun secara eksplisit, ia tidak memaklumkan dirinya sebagai Filsuf di bidang epistemologi, tetapi ide-idenya tentang epistemologi cukup banyak bertebaran dalam setiap pemikirannya.⁸

Mazhab Frankfurt pada generasi pertama mengalami kebuntuhan. Komunikasi adalah titik tolak Habermas, dan ini menjadi fundamen dalam usaha mengatasi kemacetan Teori Kritis⁹ para pendahulunya. Perkembangan filsafat sosial sejak zaman Marx pada abad ke-19 sudah disibukkan dengan usaha

⁸ Listiyono Santoso, dkk., *Epistemologi Kiri* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm 217

⁹ Mengenai pembahasan kemacetan teori kritis generasi pertama lebih lanjut dapat di Lih F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi*.

mempertautkan teori dan praksis.¹⁰ Habermas mengatakan bahwa tindakan komunikatif adalah interaksi yang diperantarai secara linguistik yang di dalamnya semua partisipan ingin mencapai tujuan-tujuan ilokusioner, dan hanya tujuan ilokusioner, dengan tindakan komunikasi sebagai perantaranya.¹¹

Tindakan komunikatif yang menjadi titik tolak untuk keluar dari kemacetan teori kritis, sekaligus menjadi dasar pemikiran Habermas selanjutnya. Hal tersebut dapat di temukan dalam konsep demokrasinya. Demokrasi Habermas yang di kenal dengan demokrasi deliberatif, tindakan komunikatif sebagai sarana untuk menghasilkan konsensus yang legitim dan diskursus sebagai prosedurnya. Dalam demokrasi deliberatif ini Habermas ingin menjawab problematika ruang publik yang mengasilkan dua sistem demokrasi. *Pertama* demokrasi liberal. *Kedua* demokrasi komunitarian. Habermas dalam penyelesaian problematika tersebut mengambil jalan tengah.

Ruang publik Habermas merupakan ruang publik politis. *Pertama* ruang publik Habermas mengacu pada kebangkitan kaum borjuis pada abad ke-18. Pada saat itu borjuis menjadi kontrol terhadap pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dalam buku *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategoris Masyarakat Borjuis*. Dalam buku tersebut ruang publik bersifat tunggal, homogen. *Kedua*, dalam buku *Between Fact and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Habermas memberikan pengakuan

¹⁰ F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif : Ilmu, Masyarakat, politik, dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas* (Yogyakarta, kanisius, 2009), hlm. 15

¹¹ Jürgen Habermas, *Teori Tindakan Komunikatif: Rasio dan Rasionalisasi Masyaratakat* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), hlm. 362

pluralitas ruang publik. Hal tersebut merupakan sebuah pengakuan refleksi terhadap kondisi masyarakat modern kontemporer yang semakin kompleks dan plural, yang mana setiap masyarakat dapat membentuk ruang publiknya sendiri.

Menurut Habermas, apa yang khas dari ruang publik ia merupakan arena diskursus, yang berbeda dan terpisah dari ekonomi dan negara, dimana melaluinya para warga berpartisipasi dan bertindak melalui dialog dan debat.¹² Habermas juga mengatakan: ruang publik tidak dapat dipahami sebagai suatu institusi dan tentu saja bukan organisasi. Ruang publik dapat digambarkan sebagai suatu jaringan untuk mengemunikasikan informasi dan pandangan-pandangan (yakni opini-opini yang mengeskpresikan sikap-sikap positif atau negatif); aliran-aliran komunikasi yang dalam proses, disaring dan disintesaikan dalam suatu cara sebagai-opini-opini publik. Seperti *Lebenswelt* sebagai suatu keseluruhan, begitu juga ruang publik direproduksi melalui tindakan komunikatif. Tindakan komunikatif adalah sarana utama ruang publik.¹³

Idealisasi komunikatif ini menurut Habermas hanya bisa diwujudkan secara memadai oleh diskursus praktis. Jadi, diskursus praktis di sini mengacu pada tidak hanya pada proses komunikasi yang ideal, melainkan juga pada aturan-aturan komunikasi yang diformulasikan dari proses komunikasi ideal itu. Ketepatan tujuan komunikasi mensyaratkan prosesnya. Dengan kata lain,

¹²Gusti A.B. Menuh, *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara agama dan negara dalam masyarakat postsekuler menurut Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 85

¹³ Jürgen Habermas, *Between Fact and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridg, MA: MIT Press, 1996), hlm 360

diskursus praktis itu sendiri berlaku sebagai prosedur komunikasi (*kommunikatives Verfahren*).¹⁴

Dalam konsep demokrasinya Habermas mengakui akan pluralitas ruang publik dan ruang publik menjadi perhatian utama. Hal tersebut sebagaimana Habermas ingin menengahi persoalan ruang publik antara demokrasi liberal dan komunitarian. Seperti yang telah dipaparkan terlebih dahulu, bahwa tindakan komunikatif dan diskursus sebagai prosedurnya untuk mencapai konsensus yang legitim.

Sejauh mana manuver tindakan komunikatif, dan diskursus sebagai prosedur dalam ruang publik demokrasi. Sehingga akan menciptakan keberpihakan terhadap semua elemen masyarakat, bukan kepada pihak mayoritas, baik dari segi ras, budaya, lebih-lebih agama. Karena belakangan ini agama selalu hadir dalam kehidupan ber-demokrasi. Dengan keberpihakannya terhadap semua elemen masyarakat, demokrasi tidak irasional dalam prakteknya akan tetapi benar-benar rasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi Jürgen Habermas tentang agama dalam diskursus ruang publik sehingga tercipta demokrasi rasional?

¹⁴F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif : menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam teori diskursus teori Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 48

2. Bagaimana relevansinya terhadap fenomena keagamaan dalam praktek demokrasi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasar latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka beberapa tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah khazanah *pemikiran tentang sistem demokrasi* khususnya tentang persoalan agama dalam ruang publik sekaligus untuk menjawab persoalan keagamaan kontemporer.
2. Untuk mengetahui pemikiran Jürgen Habermas terutama tentang peran dan posisi agama dalam ruang publik dan sejauh mana relevansinya terhadap fenomena keagamaan di Indonesia.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya pemerintah dan akademisi dalam persoalan keagamaan di Indonesia.
2. Memberikan kontribusi untuk mewujudkan toleransi dalam berbangsa dan bernegara dalam masyarakat plural.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang Jürgen Habermas telah banyak di kaji dan diteliti. Hasil kajian dan penelitian banyak dimuat dalam bentuk buku, artikel, jurnal, dan

skripsi. Meskipun penelitian tentang Habermas tidak sedikit, namun tidak akan menjadikan penelitian penulis identik dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Sejauh penulis temukan, ada beberapa tulisan yang mengkaji atau meneliti tentang Jürgen Habermas, yaitu:

Penelitian Ahmad Qolyubi mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga tahun 1999, dalam bentuk skripsi dengan judul "*Konsep Pengetahuan Jürgen Habermas*". Skripsi ini fokus pada klarifikasi Habermas atas ilmu pengetahuan. Dalam skripsi tersebut dijelaskan ada tiga kelompok ilmu pengetahuan menurut Habermas, yaitu ilmu empiris-analisis (ilmu alam), ilmu historis-hermeneutis (*ilmu sejarah dan penelitian teks kuno*), dan ilmu tindakan (*ilmu politik, ekonomi, sosiologi, dan filsafat*).

Penelitian Ibrahim A.F mahasiswa fakultas Filsafat UGM tahun 2000 dengan judul "*Kritik Rasionalitas Modern; Studi Atas Teori Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas*". Penelitian ini menemukan bahwa dalam kritik rasionalitas modern, Habermas mengkritiknya menggunakan teori tindakan komunikatif-nya dan rasionalitas modern dinilai terlalu fokus terhadap subjek (Antroposentrisme) yang menyebabkan manusia selalu berada dalam keadaan serba krisis.

Penelitian Ali Fikri Mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga tahun 2001, dalam bentuk skripsi dengan judul "*Demokrasi Jürgen Habermas: Telaah Kritis atas Emansipasi Masyarakat*". Penelitian tersebut berbicara mengenai rasio komunikatif (rasionalitas komunikasi) kaitannya dengan demokrasi. Pembahasan dalam skripsi tersebut

adalah sejauh mana konsep Demokrasi (*Demokrasi Liberatif*) Habermas dapat berpengaruh pada kelas bawah, yaitu masyarakat.

Penelitian Dwi Yulianto mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga tahun 2004. Dalam bentuk skripsi dengan judul "*Kritik Terhadap Masyarakat Kapitalisme (Herbert Marcuse dan Jürgen Habermas)*". Penelitian ini fokus terhadap kondisi Masyarakat, kemudian dipaparkan pandangan Marcus dan Habermas yang berupa kritik terhadap masyarakat yang terperangkap dalam dunia kerja, yaitu masyarakat khas kapitalisme.

Penelitian Ahmad Jauhari mahasiswa Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga tahun 2004, dalam bentuk skripsi dengan judul "*Memahami Rasio Komunikatif Jürgen Habermas*". Penelitian ini membahas mengenai hasil pemikiran Habermas tentang rasio komunikatif dan juga pertautan pemikiran rasio komunikatif Habermas dengan tokoh Mazhab Frankfrut lainnya, seperti Theodor Adorno, Horkheimer, Marcuse, dan lain-lain tentang konsepsi "rasio".

Penelitian Moch. Nasrulloh mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga tahun 2006, dalam bentuk skripsi, dengan judul "*Tanggapan Jürgen Habermas Terhadap Pandangan Postmodernitas Tentang Modernitas*". Penelitian ini membahas tanggapan-tanggapan Habermas terhadap pandangan para tokoh postmodern terhadap modernitas dan juga di bahas pertautan dan perbedaan antara pemikiran Habermas dengan tokoh-tokoh postmodern terkait kritik terhadap modernitas.

Penelitian Moh. Yunus mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga tahun 2010, dalam bentuk skripsi dengan judul “ Jürgen Habermas dan Demokrasi Deliberatif: *“Tinjaun Kritis Terhadap Praktik Demokrasi di Indonesia, demokrasi deliberatif Habermas dan konsep demokrasi di indonesia pasca-reformasi 1998”*. Penelitian ini membahas demokrasi di Indonesia, demokrasi deliberatif Habermas dan konsep demokrasi di Indonesia dalam dekade 1998, pendekatan yang di gunakan adalah demokrasi liberatif Habermas.

Penelitian Fransisco Budi Hardiman yang sudah diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul *Kritik Ideologi; menyingkap pengetahuan dan kepentingan bersama Jürgen Habermas* (Yogyakarta: kanisius, 2009), dalam skripsi ini membahas tentang latar belakang pemikiran Jürgen Habermas dan kritik terhadap modernitas, terutama Positivisme August Comte dan kawawannya.

Buku yang ditulis oleh Fransisco Budi Hardiman berjudul *menuju masyarakat komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009) pembahasan dalam buku ini membahas pemikiran Habermas tentang latar belakang teori Tindakan Komunikatif dan bagaimana teori komunikatof itu serta kontekstualisasi dengan disiplin ilmu lainnya.

Buku yang di tulis oleh Fransisco Budi Hardiman dengan judul *Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursuf Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009) membahas

tentang kaitan antara negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursuf menurut Habermas.

Tesis yang ditulis oleh Gusti A.B Menuh, sekarang sudah diterbitkan menjadi buku berjudul *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam masyarakat postsekuler menurut Jürgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015) membahas tentang hubungan agama dan negara dalam ruang publik. Bertumpu pada problem antara Sekularisme Barat dengan Komunitarianisme dan kontekstualisasinya dengan Indonesia dan Masyarakat Post-sekuler.

Dari berbagai macam tinjauan pustaka di atas, maka dalam ruang lingkup kajian akademik khususnya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta belum ada yang membahas secara komprehensif pemikiran Jürgen Habermas tentang peran dan posisi agama dalam ruang publik serta relevansinya terhadap demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas hal tersebut. Dengan judul “*DEMOKRASI RASIONAL JURGEN HABERMAS: STUDI AGAMA DALAM RUANG PUBLIK*”.

E. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode¹⁵ merupakan unsur penting yang menentukan hasil terhadap penelitian tersebut. Metode dalam penulisan ini

¹⁵ Arti harfiah kata “Metode” berasal dari Yunani *Metodos*, Meta artinya menuju, melalui, sesudah, mengikuti dan Hodos artinya jalan, cara, atau arah. (Istilah Yunani itu berasal sari bahasa latin *methodus*). Arti luas metode adalah cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu. Arti khusus; cara berpikir menurut aturan atau sistem tertentu. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 41

meliputi seluruh perkembangan pengetahuan, seluruh rangkaian dari sebuah pemulaan hingga kesimpulan ilmiah, baik dari bagian yang khusus maupun terhadap keseluruhan bidang dan objek penelitian¹⁶. Penelitian ini murni data-datanya bersumber dari kepustakaan, baik itu yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah dan lain sebagainya. Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Selanjutnya untuk memfokuskan penelitian yang terkait dengan pemikiran Jürgen Habermas digunakan tahapan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Maka dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan buku-buku yang primer maupun sekunder, yang ada kaitannya dengan seluruh refrensi yang mendukung penulisan ini.

2. Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode literatur, yaitu dengan terlebih dahulu membaca dan menelaah buku-buku dan jurnal yang ada kaitannya terhadap objek kajian.

Sedangkan literatur yang dijadikan sumber data dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Sumber Primer

Yang dimaksud dengan sumber primer adalah seluruh pembahasan dari buku-buku karya Jürgen Habermas untuk diteliti, dikaji dan dianalisis.

b. Sumber Sekunder

¹⁶ Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalis Indonesia, 1984), hlm. 10

Yang dimaksud sumber sekunder adalah terdiri dari buku-buku dan tulisan dari beberapa penulis lainnya sejauh terkait dengan tema penelitian ini.

3. Pengolahan Data

Pengelolaan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan:

- a. Deskripsi; yaitu menguraikan secara teratur seluruh konsepsi tokoh.¹⁷ Secara teknis peneliti mengadakan parafrase sebagai tolak ukur seberapa jauh peneliti mampu memahami sebuah teks sebelum melakukan analisa di balik teks itu.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti menguraikan seteratur mungkin semua konsep Jürgen Habermas dari topik yang telah ditentukan. Dalam hal ini berupa kutipan dari tokoh ataupun pembahasan ulang.
- b. Interpretasi; menyelami pemikiran tokoh, untuk menampakan arti dan nuansa yang dimaksudkan tokoh secara khas.¹⁹ Dalam filsafat interpretasi berarti menafsirkan pemikiran secara objektif. Metode ini digunakan untuk memahami dan menyelami data yang terkumpul untuk kemudian menangkap arti dan nuansa yang dimaksud tokoh secara khas.²⁰ Dengan demikian, penyusun akan memahami tulisan-tulisan dan pokok pikiran

¹⁷Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodelogi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990) hlm. 54.

¹⁸Muzairi, dkk, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: FA Press, 2014), hlm. 53.

¹⁹Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, hlm. 63.

²⁰Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, hlm. 54

Jürgen Habermas yang terdapat dalam karya-karyanya maupun karya penulis yang membahas pemikiran Jürgen Habermas.

- c. Analisis; deskripsi tentang istilah-istilah tertentu yang membutuhkan pemahakan secara kopseptual guna menemukan pemahaman lebih jauh, dengan melakukan perbandingan pikiran-pikiran yang lainnya, inilah yang disebut dengan analisis.²¹

4. Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan filosofis yakni meneliti dengan mengarah pada perumusan ide-ide dasar atau gagasan yang bersifat mendasar (*fundamental ideas*) terhadap objek persoalan yang dikaji.²²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah terdiri sebagai berikut: Bagian utama atau isi skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang tersusun secara berurutan dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang memaparkan perihal biografi Jürgen Habermas, Mazhab Frankfurt, dan epistemologi Jürgen Habermas

²¹ Louis Katso, *Pengantar Filsafat*, terj. Soerjono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 18

²²Muzairi, dkk, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm. 78.

Bab ketiga, membahas agama dalam diskursus ruang publik demokrasi deliberatif.

Bab keempat, Bab ini akan membahas relevansi pemikiran demokrasi deliberatif Jürgen Habermas terhadap fenomena keagamaan dalam praktek demokrasi di Indonesia.

Bab kelima, adalah penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjelaskan dan menganalisa data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pemikiran demokrasi Jürgen Habermas merupakan jalan tengah (*moderat*) antara demokrasi liberal dan demokrasi komunitarian. Dalam demokrasi liberal, agama dimarjinalkan atau diprivatisasi. Sehingga agama tidak boleh ikut berpartisipasi dalam ruang publik. Sebaliknya, dalam demokrasi komunitarian, agama harus berpartisipasi dalam ruang publik, bahkan boleh memenuhi lanskap-lanskap politik.

Jalan tengah (*moderat*) antara demokrasi liberal dan demokrasi komunitarian, Habermas menerapkan teori diskursus dalam demokrasi deliberatifnya. Dengan mengambil elemen-elemen penting dari keduanya dan mengintegrasikan kedalam suatu konsep yang disebut prosedur deliberasi dan proses konsensus rasional. Dalam teori diskursus Habermas, adalah penerapan teori etika diskursus yang berdasarkan tindakan komunikatifnya. Dengan berangkat dari kritik atas etika Kant yang subjektifis. Menurut Habermas, seharusnya intersubjektif, sebab subjektifitas akan jatuh pada absolutisme dan totalitarianisme.

Dalam diskursus yang dibangun adalah argumentasi yang mengandaikan kemungkinan untuk mencapai konsensus rasional, yaitu dengan cara dialog intersubjektif. Setidaknya ada tiga klarifikasi untuk mencapai konsensus yang legitim. *Pertama*, semua subjek dapat berbicara dan bertindak dalam sebuah diskursus. *Kedua*, setiap peserta diskursus boleh menyanggah pendapat peserta lain, dan dapat mengajukan pendapat apapun didalam diskursus. *Ketiga*, tidak seorangpun peserta diskursus menghalangi hak-hak yang tercantum dalam hal satu dan dua. Disamping itu juga, melalui pengujian publik. Ruang tempat berbicara, mendengarkan ini adalah ruang publik.

Ruang publik merupakan sebuah konsep yang dikembangkan Habermas guna mengaplikasikan teori diskursus kedalam politik praktis. Ruang publik merupakan wadah solidaritas informal dan formal rakyat dan pemerintah dalam menyampaikan argumentasinya. Informal adalah ruang publik yang tidak terorganisir. Sedangkan ruang formal adalah ruang yang terorganisir, misal; parlemen, dan partai politik. Dalam kaitannya dengan teori diskursus, ruang publik adalah ruang para subjek berpartisipasi secara setara dalam diskusi dalam pengambilan konsensus rasional.

Seperti yang telah di singgung sebelumnya, bahwa pemikiran demokrasi Jürgen Habermas merupakan jalan tengah (*moderat*) antara liberal dan komunitarian. *Pertama*, tidak memprivatisasi agama dalam ruang publik, sebagaimana demokrasi liberal. *Kedua*, tidak menjadikan agama sebagai kekuatan politik dalam ruang publik, sebagaimana komunitarian. Hal tersebut tentu tidak tanpa alasan. *Pertama*, masyarakat kontemporer ada pada fase post-

metafisik. *Kedua*, masyarakat kontemporer adalah sangat plural. Dalam pengambilan jalan tengah—menurut Habermas agama harus menggunakan argumentasi rasional atau nilai-nilai universal yang di bawah oleh warga religius—bukan doktrin komprehensif, dan liberal maupun komunitarian harus saling belajar—kenetralan kekuasaan negara itu bukan berpihak pada salah satu pandangan. Akan Tetapi kekuasaan negara harus menjamin semua pandangan hidup baik dari warga religius atau warga sekuler. Dengan begitu diskursus rasional akan mencapai konsensus yang legitim. Sehingga demokrasi dalam prakteknya rasional.

Perlu dipahami, konsep politik Habermas ada dua; politik informal dan politik formal. Menurut Habermas, dalam politik informal argumentasi agama diperbolehkan. Sedangkan dalam ruang publik formal argumentasi agama tidak diperbolehkan. Seharusnya, dalam politik formal yang dibangun adalah argumentasi publik atau penalaran publik.

Fenomena keagamaan di Indonesia pasca-reformasi dari konflik intra dan antar agama, terorisme, isu SARA, hingga penerapan Perda-Perda Syariah. Melihat fenomena tersebut, demokrasi deliberatif Jürgen Habermas Sangat relevan. Masyarakat plural di Indonesia harus melakukan diskursus bersama untuk saling pengertian, sehingga akan tercipta konsensus yang legitim, konsensus dianggap legitim—jika lulus di uji secara publik, artinya dalam pengambilan konsensus melibatkan semua elemen masyarakat di Indonesia. Hal ini mengingat pluralitas masyarakat, dan sudah pasti—seharusnya nilai-nilai

universal agama yang di bawah dalam ruang publik, bukan doktrin komprehensif.

Konsep demokrasi deliberatif Habermas sejalan dengan cita-cita para *Founding Father* yang memperhitungkan agama (*nilai-nilai universalitas agama*) dan tidak menjadikan agama sebagai kekuatan politik formal. Dengan begitu, keharusan akan diskursus terhadap demokrasi di Indonesia agar tidak terjadi salah pengertian dalam elemen-elemen masyarakat, dan yang paling penting keharusan politik formal dalam bernalar—yaitu bernalar publik.

B. Saran

Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Jürgen Habermas secara seksama. Perlu kiranya penulis mengajukan beberapa hal yang menjadi saran, yaitu;

1. Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya penulis berharap untuk penulis selanjutnya maupun pembaca yang budiman mampu mengadakan penjelasan lebih detail dan mendalam tentang persoalan skripsi ini. Baik dari perspektif ruang publik, tindakan komunikatif, ataupun diskursus.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi-referensi penelitian untuk perkembangan demokrasi selanjutnya. Baik yang berhubungan dengan ras, budaya, dan bahkan kekuatan-kekuatan elite politik yang mendominasi ruang publik, partai politik, dan pemerintah.

3. Saran maupun kritik yang mendalam terhadap penulisan ini sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini ke depannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Acton, HB, *Dasar-dasar Filsafat Moral: Elaborasi terhadap Pemikiran Etika Immanuel Kant*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003
- Baker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalis Indonesia, 1984
- , dan Zubair Charis, Ahamad *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Beilharz, Peter, *Teori-teori Sosial: Observasi Kritis terhadap para Filosof terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Bertens, K, *Sejarah Filsafat Kontemporer Jerman dan Inggris*, Jilid I, Jarkarta: PT Gramedia, 2014
- Dahl, Robert A, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992
- Held, David, *Demokrasi dan Tatanan Global: dari Negara Modern hingga pemerintahan kosmopolitan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Hardiman, F. Budi, *Demokrasi Deliberatif : menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam teori diskursus teori Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009
- , *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan bersama Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009
- , Editor, *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokrasi" dari Polis sampai Cyberspace*, Yogyakarta: Kanisius, 2010

- , *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2013
- Habermas, Jürgen, *Between Fact and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
- , *Teori Tindakan Komunikatif: Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.
- , *Theory and Practice*, Boston: Beacon Press, 1947.
- , *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1998.
- , *Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays*, Cambridge, Polity Press, 2008.
- Jay, Martin, *Sejarah Mazhab Frankfurt: Imajinasi Dialektis dalam perkembangan Teori Kritis*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013.
- Katso, Louis, *Pengantar Filsafat*, terj. Soerjono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historis, rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Maarif, Ahmad, Syafii, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Horkheimer, Max dan Adorno, Theodor W, *Dialektika Pencerahan: Mencari Identitas Manusia Rasional*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.
- Marcuse, Herbert, *Manusia Satu-Dimensi*, Yogyakarta: Benteng, 2000.

- Menuh, Gusti A.B, *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara agama dan negara dalam masyarakat postsekuler menurut Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Muliansyah A, *Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*, Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2015.
- Muzairi, dkk, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: FA Press, 2014.
- Parera, Frans M, dan Koekerits, T Jakob, *Gus Dur Menjawab perubahan Zaman: Warisan Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Kompas, 2010
- Poepowardojo, T.M. Soerjanto, dan Seran, Alexander, *Diskursus Teori-Teori Kritis: Kritik Kapitalisme Klasik, Modern, dan Kontemporer*, Jakarta: Kompas, 2016.
- Rawls, Jhon, *The Law of People – with “The Idea of Public Reason Revisited*, Cambridge: Harvard University Press, 2001.
- Ritzer, George, dan Goldman, Douglas J, *Teori Marxis dan berbagai ragam Teori Neo-Marxian*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Rohaniah, Yoyoh dan Efriza, *Pengantar Ilmu politik: kajian mendasar ilmu politik*, Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Sinaga, Obsatar, Dkk, *Terorisme Kanan Indonesia: Dinamika dan Penanggulangannya*, Jakarta: Gramedia, 2017.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Supriyadi, Muhammad, *Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory*, dalam *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume I, No. 3, 2015.

Suyanto, Bagong, dkk, *Filsafat Sosial*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2013.

Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia, 2001.

Susenol, Frans, Magnis, *12 Tokoh Etika Abad ke-20*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Suseno, Frans, Magnis, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta : Kanisius, 2016.

Wattimena, Reza A.A, *Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke-Rousseau-Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Wahid, Abdurrahman, (ed), *Ilusi Negara Islam. Espansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute, dan Maarif Institute, 2009.

JURNAL/MAJALAH

Hardiman, F. Budi, “Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto?”, *Basis*, LIII, November-Desember 2004.

-----, ”Etika Politik Habermas”, *Makalah Seri Kuliah Umum*, November 2010.

Hafidz, Masykurudin, dkk, Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan dalam Pemilihan Kepala daerah Serentak tahun 2018, *BANWASLU*.

Latif, Yudi, Agama dan Kebangsaan: Mewujudkan Misi Profetik dalam Kehidupan Publik”, *Titik Temu*, I, Juli-Desember 2008.

- Prasetyo, Antonius, Galih, “Menuju Demokrasi Rasional: Pemikiran Ulang tentang Ruang Publik Jürgen Habermas”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, XVI, November 2012.
- Sunarko, Adrianus, “Berteologi Agama di Zaman Post-Sekular”, *Diskursus*, XIV, April 2016.
- Sunaryo, “Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia: Politik Identitas dan Kekerasan atas Nama Agama”, *Titik Temu*, III, Juli-Desember 2010.
- Suseno, Frans, Magnis, Frans Magnis-suseno, 75 Tahun Jürgen Habermas, dalam *Basis*, LIII, November-Desember 2004.
- Supriyadi, Muhammad, “Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory”, *Keamanan Nasional*, I, 2015.
- Ummah, Sun, Choirol, “Dialektika Agama dan Negara dalam Karya Jurgen Habermas”, *Humanika*, XVI, September 2016.

